2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2020

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENDIDIKAN

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR GRAFIK vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 STRUKTUR ORGANISASI 1

1.3 TUGAS DAN FUNGSI 11

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 12

1.5 PERMASALAHAN UTAMA 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 15

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 19

3.2 REALISASI ANGGARAN 56

BAB IV PENUTUP 58

4.1 KESIMPULAN UMUM 58

4.2 LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS 60

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
1.1	Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan.....	10
1.2	Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan.....	10
1.3	Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan	11
1.4	Identifikasi Permasalahan Pendidikan	13
2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.....	17
2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2020	18
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
3.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	20
3.3	Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	22
3.4	APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2020	23
3.5	APM Sekolah Menengah Sederajat se Provinsi Riau Tahun 2020.....	26
3.6	APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2020	27
3.7	Angka Putus sekolah se Provinsi Riau Tahun 2020.....	28
3.8	Angka Putus Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2020.....	29
3.9	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 se Provinsi Riau Tahun 2020.....	31
3.10	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 se Provinsi Riau Tahun 2020.....	31
3.11	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B se Provinsi Riau Tahun 2020.....	34
3.12	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B se Provinsi Riau Tahun 2020	34
3.13	Persentase Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B Se - Provinsi Riau Tahun 2020	36
3.14	Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	37
3.15	Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	39

3.16 Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C 39
3.17 Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Angka Putus Sekolah 40
3.18 Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 41
3.19 Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Sekolah SMA Yang Berakreditasi Minimal B 42
3.20 Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B 43
3.21 Realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau 44
3.22 Realisasi Kinerja dan Anggaran 52
3.23 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 53
3.24 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 54
3.25 Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Pendidikan Provinsi Riau 56
4.1 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 58

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		HALAMAN
1.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau.....	9

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK		HALAMAN
3.1	APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2020	24
3.2	APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2020	27
3.3	Angka Putus Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2020.....	29
3.4	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau Tahun	32
3.5	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2020	35
3.6	Persentase Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2020	36

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

2 Pengukuran Kinerja Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Pendidikan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. Laporan kinerja merupakan bagian dari upaya Dinas Pendidikan dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pemenuhan kewajiban Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur Riau, menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan. Laporan Kinerja tahun 2020 merupakan laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tahun akhir untuk periode perencanaan sesuai Renstra tahun 2019-2024. Laporan kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2020 Dinas Pendidikan. Selain capaian kinerja tahun 2020, laporan juga dilengkapi dengan analisis tingkat pencapaian tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2019-2024 Dinas Pendidikan.

Tahun 2020 Dinas Pendidikan melaksanakan enam program pembangunan pendidikan. Melalui kerja keras dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, secara umum Dinas Pendidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dengan baik. Dinas Pendidikan sadar meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan namun tantangan pembangunan di bidang pendidikan masih banyak dan memerlukan kerja lebih keras pada tahun–tahun mendatang.

Tantangan seperti memperbaiki layanan pendidikan bermutu sesuai dengan SPM dan SNP, membentuk insan Indonesia yang berkarakter dan beradab, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada Jenjang Pendidikan

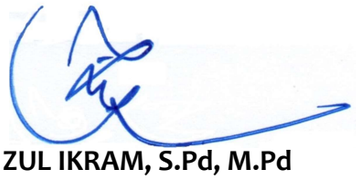
Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, diharapkan tantangan dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan selama tahun 2020. Selain itu, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan sebagai bahan masukan dalam perbaikan perumusan kebijakan bidang pendidikan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Pekanbaru,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU



ZUL IKRAM, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19721113 199702 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Provinsi Riau selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dalam rangka pemenuhan dari ketentuan perundang-undangan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

1.2.1 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:
    a. Kepala Dinas
    b. Sekretariat, terdiri atas:
        1. Subbagian Perencanaan Program
        2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang milik Daerah; dan
        3. Subbagian Kepegawaian dan Umum
    c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
    d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
    e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan Khusus.
    f. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan.
    g. Cabang Dinas.
    h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
3. Bidang dibantu oleh Pelaksana/Pejabat Fungsional.
4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Kepala Dinas Pendidikan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a)
6. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
7. Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon lV.a).

1.2.2 Tugas dan Fungsi sesuai susunan organisasi

1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang pendidikan**.**
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, peLaksanaan evaluasi dan pelaporan, peleksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain

yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan.

3. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencaaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat.
   b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat.
   c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
   d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya
5. Kepala Subbagian Perencanaan Program Mempunyai Tugas :
   a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program.
   b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program.
   c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/ kegiatan dari masing masing bidang.
   d. melaksanakan penyusunan rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja.
   e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur.
   f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis.

g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program dan;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas :
   a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
   b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang milik Daerah.
   c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset.
   d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai.
   e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset.
   f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah.
   g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Pendidikan.
   h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.
   i. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi.
   j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungJawaban anggaran.
   k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset.
   i. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja.
   l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Mempunyai Tugas :
   a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum.
   b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
   c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.
   d. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian.
   e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pengawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
   f. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai.
   g. Membuat laporan perkembangan kepengawaian.
   h. Menyelenggarakan urusan kehumasan.
   i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
   j. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanaan dinas.
   k. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
   l. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat.
   m. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
   n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum dan
   o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
    a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
    b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi :
        - penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
        - penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
        - menyusun bahan perumusan koordinasi pencapaian kurikulum, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas.
        - menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Atas.
        - penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan,
        - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
9. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
    a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
    b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi.
        - penyusunan prograrn kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

- penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- menyusun bahan perumusan koordinasi, pembinaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pembangunan karakter peserta didik, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Kejuruan.
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan,
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/kota se Provinsi Riau.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan layanan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan layanan Khusus;
- penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- menyusun bahan perumusan koordinasi, pembinaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;

- menyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
- pelaksanaan tugas kedinasan Iain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan

a. Kepala Bidang Pendataan dan pengembangan pendidikan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas pendidikan di Kabupaten/kota se Provinsi Riau

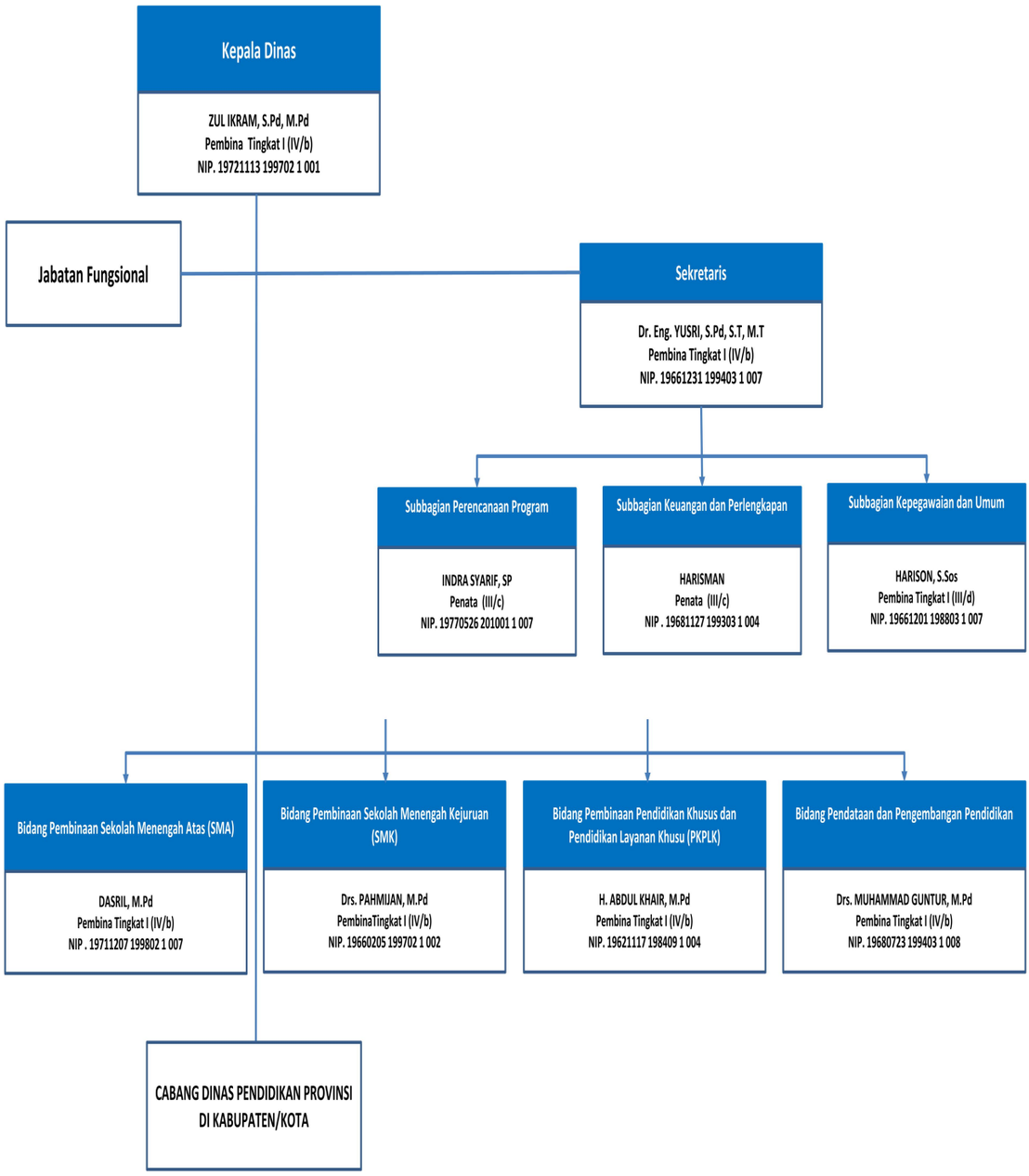
b. Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pendataan dan pengembangan Pendidikan menyelenggaraan fungsi;

- penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pendataan dan pengembangan Pendidikan;
- penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pendataan dan Pengembangan pendidikan;
- menyusun bahan perumusan koordinasi, analisis, sinkronisasi dan neraca pendidikan daerah pelaksanaan kebijakan pengelola data pendidikan, Pengembangan Kebijakan pendidikan dan tugas pembantuan, fasilitasi dan kerjasama pendidikan;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, pembangunan dan kebijakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan pendidikan, serta pelaksanaan tugas pembantuan, fasilitasi dan kerjasama pendidikan;
- melakukan penyebarluasan informasi dan pokok pendidikan dan profil pendidikan Provinsi Riau;
- menyusun kalender pendidikan;
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan

- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

1.2.3 Gambar Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau



1.2.4 Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Sumber Daya Manusia merupakan modal yang paling berharga serta merupakan aset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam

organisasi. Hal ini karena kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada. Sumber daya manusia/personil di Dinas Pendidikan terdiri dari 7.682 pegawai termasuk guru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PNS BERDASARKAN							
		STRUKTURAL				JUMLAH	FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH
		I	II	III	IV				
1	Laki-laki		1	7	11	19	2651	74	2725
2	Perempuan			2	4	6	4870	87	4957
TOTAL PNS						25	7521	161	7682

(sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diketahui bahwa PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau didominasi oleh jabatan fungsional tertentu yaitu guru dan pengawas sebanyak 7.521 orang, jabatan staf 161 orang dan Jabatan Struktural sebanyak 25 orang.

Tabel 1.2
Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PNS BERDASARKAN									
		TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	S1	S2	S3	
1	Laki-laki	11	15	172	2	2	52	2031	445	6	2736
2	Perempuan	2	4	219	4	8	67	4184	453	5	4946
TOTAL PNS		13	19	391	6	10	119	6215	898	11	7982

(sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Dari data pada tabel 1.2 diketahui bahwa pendidikan PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata1 (S.1) yang berjumlah 6.215 orang dan SMA/Sederajat berjumlah 391 orang. Jika dilihat dari PNS yang memiliki tingkat pendidikan S2 dan S3 adalah sebanyak 909 orang dari seluruh PNS Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Hal ini menggambarkan tingkat pendidikan pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah cukup baik.

Tabel 1.3
Klasifikasi Pegawai menurut Golongan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PNS BERDASARKAN				
		GOLONGAN I				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	17	146	1611	934	2708
2	Perempuan	2	175	3410	1374	4961
TOTAL PNS		19	321	5021	2308	7669

(sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Berdasarkan data pada tabel 1.3 diketahui bahwa PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 5.021 atau sedang golongan terkecil adalah golongan II yang berjumlah 321 orang.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tugas Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Dinas Pendidikan bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
   b. Pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah

Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan

d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau sesuai dengan kewenangannya, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Masih adanya Kesenjangan Aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat di daerah ataupun di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas pendidikan, kesulitan menjangkau lokasi pendidikan dan rendahnya kemampuan ekonomi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Masih adanya Kesenjangan Kualitas pendidikan antara perkotaan dengan di daerah. Hal ini disebabkan perbedaan ketersediaan fasilitas pendidikan dan belum meratanya penyebaran guru dan Penerapan kurikulum 2013 yang belum maksimal
3. Belum terdapatnya kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
4. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarpras pendidikan menengah terutama kejuruan
5. Belum optimalnya pendataan semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia sekolah berkesempatan menikmati layanan pendidikan yang sesuai
6. Terbatasnya jumlah tenaga pendidik.

1.5 PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2018 Tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait dengan pencapaian layanan pendidikan, melihat hasil pencapaian tahun sebelumnya di identifkasi permasalahan sebagai berikut :

1. Aksesibilitas Pendidikan
2. Kualitas Tenaga Pendidikan
3. Mutu Pendidikan dan Relevansi Pendidikan

Identifikasi permasalahan Pendidikan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel 1.4
Identifikasi Permasalahan Pendidikan

NO	MASALAH POKOK (Tujuan & Sasaran)	MASALAH (Strategi)		AKAR MASALAH (Arah Kebijakan)	
1	Belum Terwujudnya Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun				
1.1	Masih Rendahnya Aksesibilitas terhadap Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1.	Masih Rendahnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	-	Masih kurangnya Sarana dan prasarana Pendidikan
				-	Sarana dan prasarana Pendidikan yang tidak merata
				-	Masih Banyaknya Sarana prasarana Pendidikan dalam kondisi rusak
				-	Masih terbatasanya jangkauan terhadap layanan pendidikan
		2.	Keterjangkauan dalam mendapatkan layananan pendidikan masih sulit	-	Belum terpenuhinya kebutuhan operasional penyelenggaran Pendidikan
				-	Masih Adanya Siswa Miskin yang tidak dapat

					melanjutkan Sekolah
				-	Masih adanya Biaya-biaya Lain pada Sekolah (yang dibebankan kepada Peserta Didik)
				-	Jarak Sekolah dengan Pemukiman yang relatif jauh
1.2	Masih Rendahnya Kualitas tenaga Pendidik dan Kependidikan	1.	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih Rendah	-	Kualifikasi Guru dibawah D-IV / S-1
				-	Rendahnya Kualitas / Kompetensi Tenaga Pendidik
1.3	Masih rendahnya Mutu dan Relevansi Pendidikan bagi peserta didik	a.	Keterbatasan Penyediaan Fasilitas Belajar siswa	-	Media Pembelajaran Siswa yang masih belum terpenuhi
				-	Alat Praktek dan Alat labor yang masih belum terpenuhi
		b.	Rendahnya Kompetensi Dasar yang dimiliki oleh peserta Didik	-	Rendahnya kemampuan pemahaman akademik bagi peserta didik
		c.	Ketidaksesuaian Pendidikan Kejuruan dengan Ketersediaan Lapangan Kerja	-	Kurangnya / tidak ada sikronisasi kurikulum SMK dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)
				-	Payung Hukum / sangsi terhadap perusahaan yang tidak respon baik dengan pihak SMK / Pemerintah
				-	Kurang terpenuhinya sertifikasi profesi bagi peserta didik SMK dari Lembaga Sertifikasi Profesi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan adanya perencanaan kinerja ini maka konsepsi organisasi menjadi jelas dan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan kinerja dapat menentukan keberhasilan organisasi.

Pemerintah Provinsi Riau mengambil alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dari Pemerintah Kabupaten/kota. Hal itu merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa menyebutkan manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah Kabupaten/Kota hanya menangani Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sehingga Pemerintah Provinsi Riau merubah RPJMD dan mengacu pada perubahan RPJMD, Dinas Pendidikan membuat Renstra untuk Periode Tahun 2019-2024.

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau antara lain :

1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

   Untuk merealisasikan misi Kepala Daerah, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2019-2024 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi Kepala Daerah.

1.1 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan strategis Dinas Pendidikan tahun 2019-2024 adalah **"Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun"**.

Adapun Indikator program Sasaran/kinerja adalah sebagai berikut :

- Rata-Rata Lama Sekolah
- Harapan Lama Sekolah

1.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Riau (2019-2024)

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024. **Sasaran strategis** Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).
   - Adapun Indikator Sasaran/kinerja adalah sebagai berikuit:
     1) APK SMA/MA/SMALB/Paket C (%)
     2) APM SMA/MA/SMALB/Paket C (%)
     3) Angka Putus Sekolah
2. Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).
   - Adapun Indikator Sasaran/ kinerja adalah sebagai berikut :
     - Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1
3. Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik.
   - Adapun Indikator Sasaran/kinerja adalah sebagai berikut:
     1) Persentase sekolah SMA yang berakreditasi minimal B
     2) Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun			1	Rata-rata Lama Sekolah	8,97	9,04	9,11	9,18	9,24
				2	Harapan Lama Sekolah	13,57	13,74	13,92	14,10	14,28
		1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	85,26	85,56	85,86	86,16	86,46
				2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	62,09	62,59	63,09	63,09	64,09
				3	Angka Putus Sekolah	1,01	1,00	0,9	0,8	0,7
		2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,44	95,94	96,44	96,94	97,44
		3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	82,63	82,83	83,03	83,23	83,43
				2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	54,83	55,03	55,23	55,43	55,63

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan tahun 2019-2024 dan sumber daya anggaran (murni) yang ada, Disdik telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2020. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

Isi dari perjanjian kinerja tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET MURNI
	(1)	(2)		(3)
1.	**Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus**	1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) :	
			- SMA/ SMK/ MA/ SMLB/Paket C	85.26%
		2.	Angka Partisipasi Murni (APM) :	
			- SMA/SMK/MA/ SMLB/Paket C	62.09%
		3.	Angka Putus Sekolah	1.01
2.	**Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**	1.	1. Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95.44
3.	**Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik**	1.	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	82.63
		2.	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	54.83

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 15.820.841.517,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.820.000.000,00	APBD
3	Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah	Rp. 385.617.844.986,00	APBD
4	Program Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus	Rp. 29.855.358.450,00	APBD
5	Program Bantuan Operasional Sekolah	Rp. 746.390.598.000,00	APBD
6	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rp. 132.765.252.100,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas pendidikan Provinsi Riau selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2020 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. hasil pengumpulan data selanjutnya

dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	85,26	86,65	101,63
		2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	62,09	66,86	107,68

		3	Angka Putus Sekolah	1,01	0,76	132,89
2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,44	96	100,59
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	82,63	86,5	104,68
		2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	54,83	81,19	148,08

3.1.1.1 Capaian Kinerja Organisasi

A. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Dalam meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Riau untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM periode sebelumnya. Untuk itu, sampai dengan tahun 2020 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan. Pembangunan pendidikan di Provinsi Riau

senantiasa perlu terus ditingkatkan, agar dapat selaras dengan tiga pilar pembangunan pendidikan nasional.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama yang ada dalam perjanjian kinerja, yaitu:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/PaketC.
2. Angka Partisipasi Murni (APM) MA/SMK/MA/SMLB/Paket C;
3. Angka Putus Sekolah

Adapun target dan pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Sederajat

Indikator APK SMA/MA Sederajat digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 } - \text{18 Tahun}} X\ 100\%$$

Tabel 3.3
Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja
APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	85,26	86,65	101,63

Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

merupakan sasaran strategis untuk mendukung tercapainya tujuan mewujudkan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui IKU "APK Provinsi SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C".

Capaian Kinerja tahun 2020 sebesar 101,63% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada tahun 2020 berhasil dicapai.

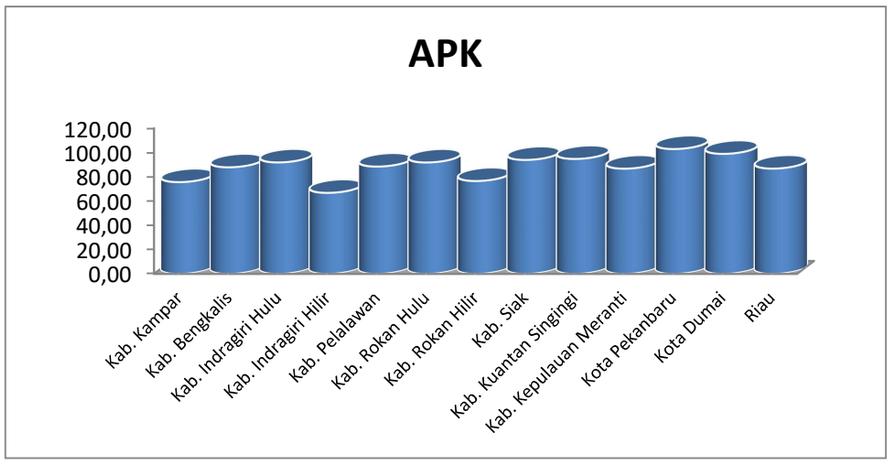
Berikut pencapaian angka partisipasi kasar APK SMA/SMK/SMLB/ Paket C Provinsi Riau tahun 2020 terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.4
APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2020

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 16-18	Jumlah siswa keseluruhan	APK %
1	Kab. Kampar	46.416	33.255	75.53
2	Kab. Bengkalis	36.754	30.62	87.73
3	Kab. Indragiri Hulu	22.613	18.688	91.74
4	Kab. Indragiri Hilir	40.599	25.921	66.68
5	Kab. Pelalawan	19.273	15.466	88.32
6	Kab. Rokan Hulu	27.906	22.933	91.70
7	Kab. Rokan Hilir	44.451	30.964	76.43
8	Kab. Siak	25.348	22.307	93.81
9	Kab. Kuantan Singingi	16.315	14.697	94.62
10	Kab. Kepulauan Meranti	10.66	8.996	86.59
11	Kota Pekanbaru	59.242	57.614	102.78
12	Kota Dumai	15.423	13.967	98.78
	Provinsi Riau	**365.000**	**295.428**	**86.65**

Sumber : Data Referensi Kemdikbud

Grafik 3.1
APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota
Se Provinsi Riau Tahun 2020



Sumber : Data Referensi Kemdikbud

Tabel 3.4 dan grafik 3.1 tersebut menunjukkan ada 4 (empat) Kabupaten/Kota yang capaian APK berada dibawah rata-rata APK Provinsi, yaitu Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir (76,43%), Kabupaten Kampar (75,53%), Kabupaten Kepulauan Meranti (86,59%) dan Kabupaten Indragiri Hilir (66,68%), dengan capaian terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian intervensi pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai sasaran strategis pemerataan dan akses layanan pendidikan menengah yang seharusnya mendapat prioritas utama terhadap program dan kegiatan adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Kampar, dan Kepulauan Meranti tetapi untuk daerah yang tinggi APK nya pun dapat diprioritaskan mengingat PPDB secara zonasi.

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Sederajat.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah

dapat bersekolah tepat waktu. APM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa SMA/MA/SMK/Paket C Usia 16 – 18 Th}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \text{ X } 100\%$$

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Sederajat digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah dan program pembangunan sekolah terpadu, dengan kegiatan antara lain pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru.

Untuk mengukur ketercapaian indikator ini diperlukan data Jumlah siswa Sekolah Menengah Sederajat Usia 16-18 Tahun dan jumlah penduduk usia 16–18 Tahun. Indikator APM SM Sederajat diperoleh dengan cara membagi Jumlah siswa SM Sederajat Usia 16-18 Tahun dengan jumlah penduduk usia 16 – 18 Tahun dikalikan 100%.

Berdasarkan data dari Data Referensi Pendidikan Kemendikbud RI, ahun 2019 siswa SM Sederajat Usia 16-18 Tahun di Provinsi Riau berjumlah 244.024 dan jumlah penduduk berusia 16–18 Tahun berjumlah 365.000 jiwa, dengan demikian APM SM sederajat Provinsi Riau adalah 66,86%. Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
APM Sekolah Menengah Sederajat
se Provinsi Riau Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	62,09	66,86	107,68

sumber : Data Referensi Kemendikbud

Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus merupakan sasaran strategis untuk mendukung tercapainya tujuan mewujudkan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui IKU "APM Provinsi SMA/MA/SMK/SMLB/ Paket C".

Capaian Kinerja tahun 2020 sebesar 107,68% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada tahun 2020 berhasil dicapai.

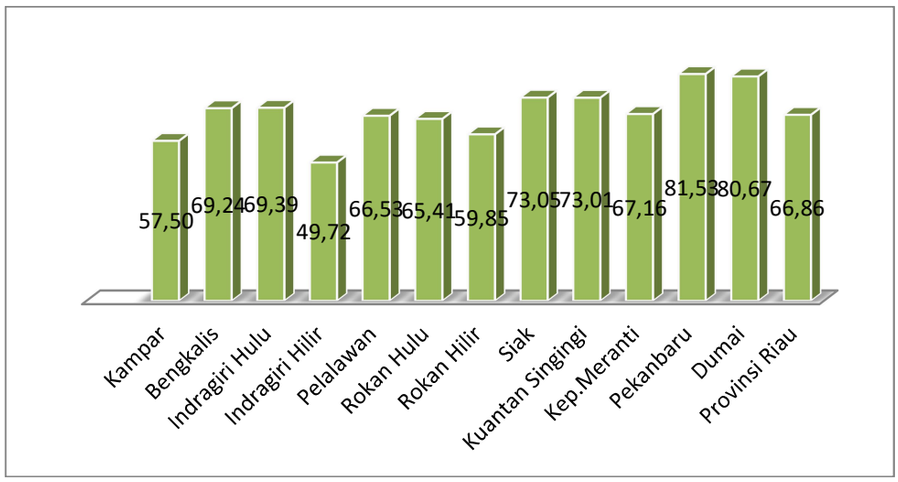
Berikut pencapaian APM SMA/SMK/SMLB/Paket C Provinsi Riau tahun 2020 terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.6
APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota
se Provinsi Riau Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 16-18	Jumlah Siswa Usia 16-18	APM %
1	Kampar	46.416	26.689	57.50.00
2	Bengkalis	36.754	25.45.00	69.24.00
3	Indragiri Hulu	22.613	15.692	69.39.00
4	Indragiri Hilir	40.599	20.185	49.72
5	Pelalawan	19.273	12.822	66.53.00
6	Rokan Hulu	27.906	18.252	65.41.00
7	Rokan Hilir	44.451	26.605	59.85
8	Siak	25.348	18.517	73.05.00
9	Kuantan Singingi	16.315	11.911	73.01.00
10	Kep.Meranti	0,4625	7.159	67.16.00
11	Pekanbaru	59.242	48.301	81.53.00
12	Dumai	15.423	12.441	80.67
	Provinsi Riau	**365.000**	**244.024**	**66.86**

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.2
APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota
se Provinsi Riau Tahun 2020



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.6 dan grafik 3.2 tersebut diatas terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang realisasi/capaian APM SM Sederajat berada jauh di bawah rata-rata APM Provinsi yaitu Kabupaten Indragiri Hilir 49,72%(paling terendah), Kabupaten Rokan Hilir

dengan capaian APM sebesar 59.85%, Kabupaten Kampar dengan capaian APM sebesar 57,50% dan Kabupaten Pelalawan dengan capaian APM sebesar 66,53%. Realisasi capaian APM SM Sederajat tertinggi adalah Kota Pekanbaru sebesar 81,53%.

3. Angka Putus Sekolah.

Angka Putus Sekolah (APtS) adalah Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 16-18 tahun tingkat SMA sederajat.

APtS dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa SMA/SMK}}{\text{Jumlah seluruh siswa SMA/SMK}} \text{ X } 100\%$$

Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Angka Putus sekolah se Provinsi Riau Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	Angka Putus Sekolah	1,01	0,76	132,89

C

apaian Kinerja tahun 2020 sebesar 132,89% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada tahun 2020 berhasil dicapai.

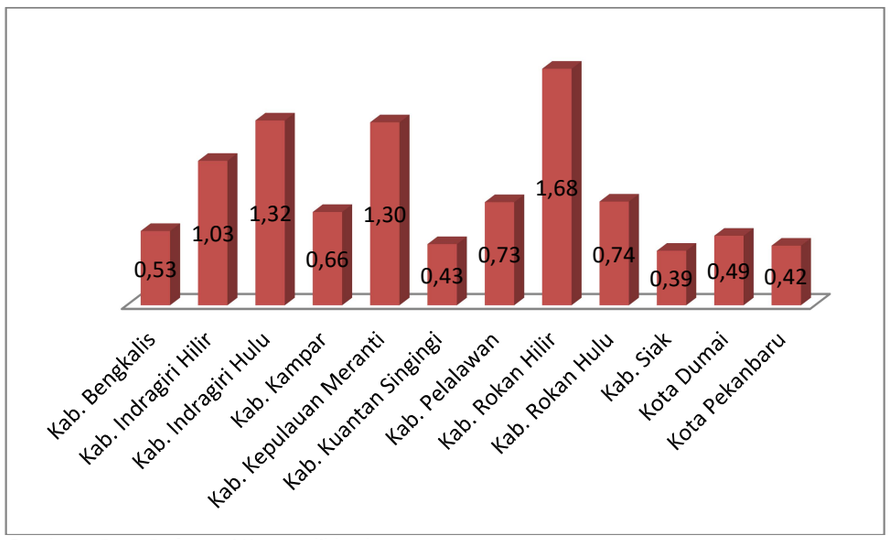
Berikut pencapaian angka partisipasi kasar APM SMA/SMK/SMLB/ Paket C Provinsi Riau tahun 2020 terlihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.8
Angka Putus Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2020

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah siswa putus sekolah	Jumlah siswa keseluruhan	Persentase siswa putus sekolah
1	Kab. Bengkalis	147	27818	0,53
2	Kab. Indragiri Hilir	192	18681	1,03
3	Kab. Indragiri Hulu	219	16653	1,32
4	Kab. Kampar	184	27717	0,66
5	Kab. Kepulauan Meranti	92	7068	1,30
6	Kab. Kuantan Singingi	59	13567	0,43
7	Kab. Pelalawan	112	15264	0,73
8	Kab. Rokan Hilir	471	27988	1,68
9	Kab. Rokan Hulu	159	21544	0,74
10	Kab. Siak	82	21139	0,39
11	Kota Dumai	67	13552	0,49
12	Kota Pekanbaru	229	53986	0,42
	Total	**2013**	**264977**	**0,76**

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.3
Angka Putus Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2020



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel dan grafik tersebut diatas terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang realisasi/capaian APtS SM Sederajat berada jauh di atas rata-rata APtS Provinsi yaitu Kabupaten Indragiri Hilir 1,03%, Kabupaten Indragiri Hulu dengan capaian APtS sebesar 1,32%, Kabupaten Kep. Meranti dengan capaian APtS sebesar 1,30% dan

Kabupaten Rokan Hilir dengan capaian APtS sebesar 1,68% (Paling tinggi).

B. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Dalam meningkatkan Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan, untuk mengetahui kualitas pendidikan dan kualitas lulusan Siswa di Provinsi Riau. Guru merupakan komponen penting dan dianggap memiliki tanggung jawab besar terhadap keberhasilan pendidikan. Tinggi rendahnya atau baik buruknya kualitas pembelajaran di suatu Sekolah bergantung dan sangat ditentukan oleh peranan kinerja Guru. Masih rendahnya kinerja guru tidak terlepas dari masalah Kualifikasi, baik Kualifikasi akademik maupun kualifikasi non Akademik masih banyak guru yang memiliki kualifikasi di bawah standar/SI.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama yang ada dalam perjanjian kinerja, yaitu Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1.

Adapun target dan pencapaian Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 dapat dijelaskan bahwa pencapaian Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan Menengah, dicapai melalui Program Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga Kependidikan, dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Guru Kualifikasi Pendidikan min S1/D4 SMA/SMK}}{\text{Jumlah Keseluruhan Guru SMA/SMK}} X\ 100\%$$

Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 se Provinsi Riau Tahun 2020

No	C	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1		2		3	4	5	
1		Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,44	96	100,59

Capaian Kinerja tahun 2020 sebesar 100,59% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikanpada tahun 2020 berhasil dicapai.

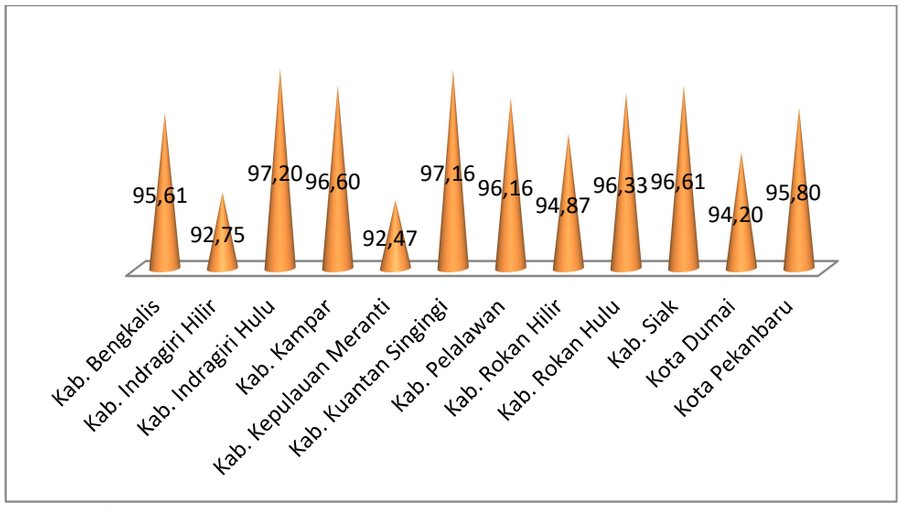
Berikut pencapaian Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 Provinsi Riau tahun 2020 terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.10
Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 se Provinsi Riau Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Guru Kualifikasi Pendidikan min S1/D4 SMA/SMK	Jumlah Keseluruhan Guru SMA/SMK	Persentase Guru Kualifikasi Pendidikan min S1/D4 SMA/SMK
1	Kab. Bengkalis	1.959	2.049	95,61
2	Kab. Indragiri Hilir	1.304	1.406	92,75
3	Kab. Indragiri Hulu	1.217	1.252	97,20
4	Kab. Kampar	2.218	2.296	96,60
5	Kab. Kepulauan Meranti	540	584	92,47
6	Kab. Kuantan Singingi	1.164	1.198	97,16
7	Kab. Pelalawan	1.077	1.120	96,16
8	Kab. Rokan Hilir	1.774	1.870	94,87
9	Kab. Rokan Hulu	1.601	1.662	96,33
10	Kab. Siak	1.424	1.474	96,61
11	Kota Dumai	990	1.051	94,20
12	Kota Pekanbaru	3.990	4.165	95,80
	Total	**19.258**	**20.127**	**95,68**

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.4
Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1
Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2020



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari table 3.10 dan grafik 3.4 tersebut diatas terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang realisasi/capaian Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 SM Sederajat berada jauh di bawah rata-rata Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 Provinsi yaitu Kabupaten Indragiri Hilir 92,75%, Kabupaten Kep. Meranti dengan capaian Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 92,47%,(paling rendah), Kabupaten Rokan Hilir dengan capaian Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 94,87% dan Kota Dumai dengan capaian Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 94,20%.

C. Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikann Nasional Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi, berbunyi sebagai berikut: I) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk

akuntabilitas publik; dan 3) Akreditasi di lakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Sejalan dengan hal di atas, dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 86 dinyatakan hal-hal sebagai berikut: 1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/satuan pendidikan; 2) Kewenangan akreditasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang di beri kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi; 3) Akreditasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama yang ada dalam perjanjian kinerja, yaitu :

1. Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B
2. Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B

Adapun target dan pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B

Indikator Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah, dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sekolah SMA yang berakreditasi Meninimal B}}{\text{Jumlah Sekolah SMA}} X\ 100\%$$

Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B
se Provinsi Riau Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	
1	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	82,63	86,5	104,68

Capaian Kinerja tahun 2020 sebesar 104,68% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik pada tahun 2020 berhasil dicapai.

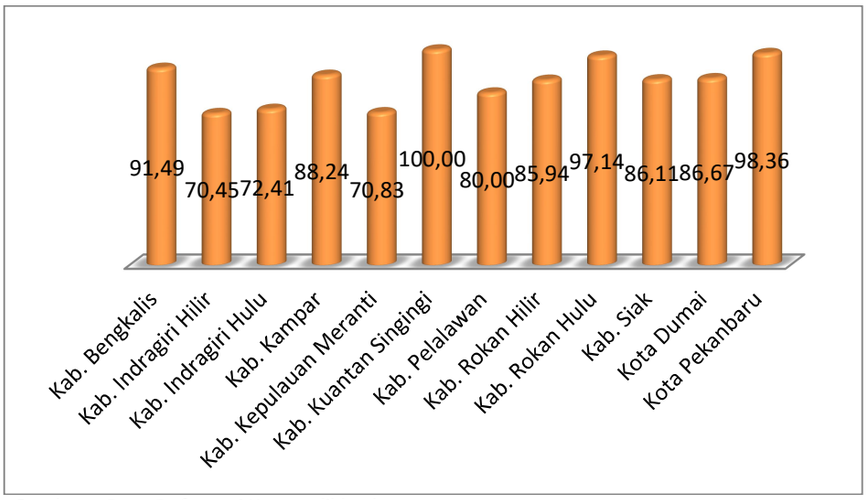
Berikut pencapaian Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B Provinsi Riau tahun 2020 terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.12
Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B
se Provinsi Riau Tahun 2020

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah SMA	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B
1	Kab. Bengkalis	43	47	91,49
2	Kab. Indragiri Hilir	31	44	70,45
3	Kab. Indragiri Hulu	21	29	72,41
4	Kab. Kampar	45	51	88,24
5	Kab. Kepulauan Meranti	17	24	70,83
6	Kab. Kuantan Singingi	21	21	100,00
7	Kab. Pelalawan	20	25	80,00
8	Kab. Rokan Hilir	55	64	85,94
9	Kab. Rokan Hulu	34	35	97,14
10	Kab. Siak	31	36	86,11
11	Kota Dumai	13	15	86,67
12	Kota Pekanbaru	60	61	98,36
	Total	**391**	**452**	**86,50**

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.5
Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B
Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2020



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.12 dan grafik 3.5 tersebut diatas terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang realisasi/capaian Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B SM Sederajat berada jauh di bawah rata-rata Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hilir 70,45%, (paling rendah) Kabupaten Indragiri hulu dengan capaian Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B sebesar 72,41%, dan Kabupaten Kep. Meranti dengan capaian Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B sebesar 70,83%.

2. Persentase Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B

Indikator Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah, dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah Sekolah SMK}} X\ 100\%$$

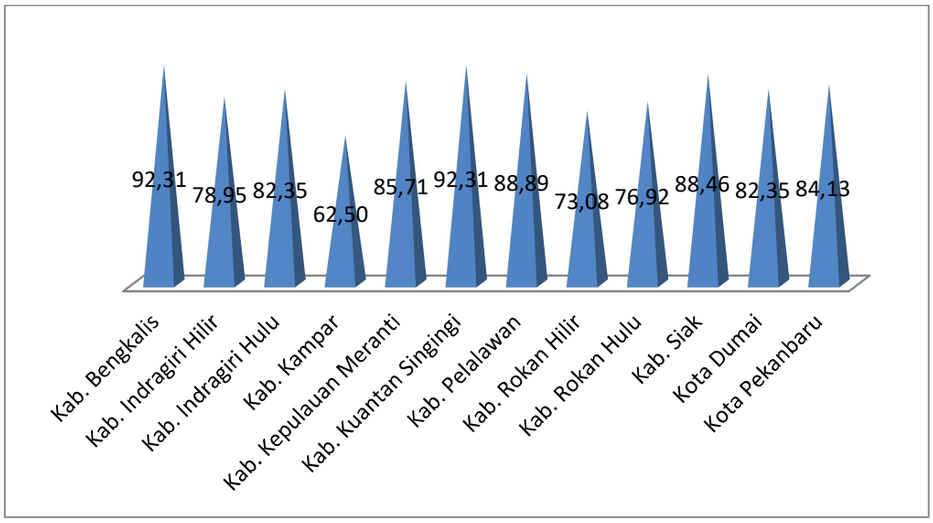
Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Persentase Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B
Se - Provinsi Riau Tahun 2020

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah SMK	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B
1	Kab. Bengkalis	24	26	92,31
2	Kab. Indragiri Hilir	15	19	78,95
3	Kab. Indragiri Hulu	14	17	82,35
4	Kab. Kampar	20	32	62,50
5	Kab. Kepulauan Meranti	6	7	85,71
6	Kab. Kuantan Singingi	12	13	92,31
7	Kab. Pelalawan	16	18	88,89
8	Kab. Rokan Hilir	19	26	73,08
9	Kab. Rokan Hulu	30	39	76,92
10	Kab. Siak	23	26	88,46
11	Kota Dumai	14	17	82,35
12	Kota Pekanbaru	53	63	84,13
	Total	**246**	**303**	**81,19**

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.6
Persentase Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B
Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2020



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.13 dan grafik 3.6 tersebut diatas terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang realisasi/capaian Persentase Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B berada jauh di bawah

rata-rata Persentase Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hilir 78,95%, Kabupaten Kampar dengan capaian Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B sebesar 62,50%, (Paling Rendah), Kabupaten Rokan Hilir dengan capaian Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B sebesar 73,08%. dan Kabupaten Rokan hulu dengan capaian Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B sebesar 76,92%.

3.1.2 Membandingkan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel. 3.14
Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2019			Tahun 2020		
				Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja	Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	84,96	82,54	97,15	85,26	86,65	101,63
		2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	61,59	63,81	103,60	62,09	66,86	107,68
		3	Angka Putus Sekolah	0	0	0	1,01	0,76	132,89
2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	0	0	0	95,44	96	100,59
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	0	0	0	82,63	86,5	104,68

		2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	0	0	0	54,83	81,19	148,08

Data Capaian kinerja tersebut diatas menggambarkan bahwa :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dengan 3 (tiga) indikator pendukung yaitu APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C, APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C dan Angka Putus Sekolah. Dari ke 3 (tiga) indikator tersebut hanya 2 (dua) indikator yang merupakan indikator pada Renstra Tahun 2015 – 2019 yaitu indikator APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C dan indikator APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C. Realisasi kinerja tahun 2019 APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C sebesar 86,65% dengan Target 84,96% sehingga capaian kinerja 101,99% sedangkan untuk tahun 2020 Realisasi Kinerja APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C sebesar 86,65% dengan Target 85,26% sehingga capaian kinerja 101,63%. Realisasi kinerja Tahun 2019 APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C sebesar 66,86% dengan Target 61,59% sehingga capaian kinerja 108,55% sedangkan untuk tahun 2020 Realisasi Kinerja sebesar 66,86% dengan Target 62,09% sehingga capaian kinerja 107,68%.

   Perbandingan realisasi indikator kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus adalah sebagai berikut :

   a. APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C

      Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan tren pencapaian angka partisipasi Kasar SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel. 3.15
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C

Indikator Kinerja	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
APK SM Sederajat	77,97	81,39	82,54	86,65

Dari tabel 3.15 diatas tren pencapaian Angka Partisipasi Kasar SM Sederajat Provinsi Riau pada 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Realisasi Untuk tahun 2017 sebesar 77,97%, tahun 2018 81,39% dengan rasio peningkatan sebesar 3,42% dari tahun 2017. Realisasi untuk tahun 2020 sebesar 86,65% meningkat sebesar 4,11% dari tahun 2019 sebesar 82,54%.

a. APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C

Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan tren pencapaian angka partisipasi Murni SM Sederajat Provinsi Riau pada 4 (empat) tahun terakhir :

Tabel. 3.16
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C

Indikator Kinerja	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
APM SM Sederajat (Provinsi)	58,63	60,22	63,81	66,86

Dari tabel diatas tren pencapaian Angka Partisipasi Murni SM Sederajat Provinsi Riau pada 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Realisasi Untuk tahun 2017 sebesar 58,637%, tahun 2018 sebesar 60.22% dengan rasio peningkatan sebesar 1,59% dari tahun 2017. Realisasi untuk tahun 2020 sebesar 66,86% meningkat 3,05% dari tahun 2019 sebesar 63,81%.

b. Angka Putus Sekolah

Indikator Angka Putus Sekolah belum menjadi indikator pada Renstra tahun 2015-2019. Tabel dan grafik dibawah ini

menggambarkan tren pencapaian angka Putus Sekolah SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel. 3.17
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Angka Putus Sekolah

Indikator Kinerja	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Putus Sekolah	0,90	0,04	2,10	1,34	0,76

Dari tabel 3.17 diatas tren pencapaian Angka Putus Sekolah SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pencapaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Realisasi Angka Putus Sekolah untuk tahun 2016 sebesar 0,90%, tahun 2017 sebesar 0,04% dengan rasio penurunan sebesar 0,04% dari tahun 2016. Realisasi Angka Putus Sekolah untuk tahun 2018 meningkat menjadi 2,10% dari tahun 2017 dengan rasio peningkatan sebesar 2,06%. Di Tahun 2019 Angka Putus Sekolah menurun kembali menjadi sebesar 1,34% dari tahun 2018 dengan rasio penurunan sebesar 0,76%. Di tahun 2020 Angka Putus Sekolah menurun kembali menjadi 0,76% dari tahun 2019 dengan rasio penurunan sebesar 0,58%. Indikator Angka Putus Sekolah semakin kecil semakin baik dalam mencerminkan partisipasi sekolah siswa dan meningkatan akses pendidikan menengah.

2. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1.

   Indikator Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 belum menjadi indikator pada Renstra tahun 2015-2019. Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan tren pencapaian Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel. 3.18
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1

Indikator Kinerja	Tahun				
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Persentase Guru Kualifikasi Pendidikan min S1/D4 SMA/SMK	93,84	94,97	95,92	96,00	96,00

tabel 3.18 diatas tren pencapaian Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan pencapaian/tetap setiap tahunnya. Realisasi Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 untuk tahun 2016 sebesar 93,84%, tahun 2017 sebesar 94,97% dengan rasio peningkatan sebesar 1,13% dari tahun 2016. Realisasi Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 untuk tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 95,92% dari tahun 2017 dengan rasio peningkatan sebesar 0,95%. Di Tahun 2019 Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 meningkat menjadi sebesar 96,00% dari tahun 2018 dengan rasio peningkatan sebesar 0,08%. Di tahun 2019 dan tahun 2020 Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 tetap sebesar 96,00%.

3. Sasaran strategis Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik dengan Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B, Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B

   a. Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B

   Indikator Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B belum menjadi indikator pada Renstra tahun 2015-2019. Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan tren pencapaian Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B SM Sederajat Provinsi Riau pada 4 (empat) tahun terakhir :

Tabel. 3.19
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Sekolah SMA Yang Berakreditasi Minimal B

Indikator Kinerja	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Persentase program keahlian SMA yang berakreditasi minimal B	72,70	81,50	86,70	86,50

Dari tabel 3.19 diatas tren pencapaian Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B Provinsi Riau pada 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan peningkatan pencapaian/tetap setiap tahunnya. Realisasi Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B untuk tahun 2017 sebesar 72,70%, tahun 2018 sebesar 81,50% dengan rasio peningkatan sebesar 8,80% dari tahun 2017. Realisasi Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B untuk tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 86,70% dari tahun 2018 dengan rasio peningkatan sebesar 5,20%. Di Tahun 2020 Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B mengalami penurunan sebesar 86,50% dari tahun 2019 dengan rasio penurunan sebesar 0,20%. Terjadinya penurunan Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B karena ada beberapa sekolah yang masa akreditasinya berakhir dan adanya perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta adanya penambahan jumlah sekolah swasta yang baru yang belum terakreditasi.

b. Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B

Indikator Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B belum menjadi indikator pada Renstra tahun 2015-2019. Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan tren pencapaian Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B SM Sederajat Provinsi Riau pada 4 (empat) tahun terakhir :

Tabel. 3.20
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B

Indikator Kinerja	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	29,00	54,20	82,10	81,19

Dari tabel 3.20 diatas tren pencapaian Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B Provinsi Riau pada 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan pencapaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Realisasi Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B untuk tahun 2017 sebesar 29,00%, tahun 2018 sebesar 54,20% dengan rasio peningkatan sebesar 25,00% dari tahun 2017. Realisasi Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B untuk tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 82,10% dari tahun 2018 dengan rasio peningkatan sebesar 27,90%. Di Tahun 2020 Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B mengalami penurunan sebesar 81,19% dari tahun 2019 dengan rasio penurunan sebesar 0,91%. Dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal maka akreditasi Sekolah SMK tidak berdasarkan Program Keahlian lagi tetapi berdasarkan akreditasi satuan pendidikannya. Terjadinya penurunan Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B pada tahun 2020 karena ada beberapa sekolah yang masa akreditasinya berakhir dan serta adanya penambahan jumlah sekolah swasta yang baru yang belum terakreditasi.

3.1.3 Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Tabel 3.21
Realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra
Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	86,46	86,65	99,78
		2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	64,09	66,86	104,32
		3	Angka Putus Sekolah	0,7	0,76	108,57
2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	97,44	96	98,52
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	83,43	86,5	103,68
		2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	55,63	81,19	145,95

Dari tabel 3.21 diatas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dengan 3 (tiga) indikator pendukung yaitu APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C, APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C dan Angka Putus Sekolah. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan capaian terhadap target akhir renstra adalah sebagai berikut :

   a. **APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C**

      Indikator Kinerja APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C untuk realisasi tahun 2020 sebesar 86,65% dengan target akhir Renstra sebesar 64,46% dan capaian tahun 2020 terhadap target akhir sebesar

99,78%. Target akhir renstra tahun 2024 hampir 100% tercapai. Jika ada perubahan/revisi Renstra Tahun 2019-2024 dapat direkomendasikan perubahan target indikator APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, karena target telah tercapai dan penentuan target yang rendah.

b. APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C

Indikator Kinerja APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C untuk realisasi tahun 2020 sebesar 66,86% dengan target akhir Renstra sebesar 64,09% dan capaian tahun 2020 terhadap target akhir sebesar 104,32%. Target akhir renstra tahun 2024 tercapai melebihi 100%. Jika ada perubahan/revisi Renstra Tahun 2019-2024 dapat direkomendasikan perubahan target indikator APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, karena target telah tercapai dan penentuan target yang rendah.

c. Angka Putus Sekolah

Indikator Kinerja Angka Putus Sekolah untuk realisasi tahun 2020 sebesar 0,76% dengan target akhir Renstra sebesar 0,70% dan capaian tahun 2020 terhadap target akhir sebesar 108,57%. Target akhir renstra tahun 2024 tercapai melebihi 100%. Jika ada perubahan/revisi Renstra Tahun 2019-2024 dapat direkomendasikan perubahan target indikator Angka Putus Sekolah untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator pendukung yaitu Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan capaian terhadap target akhir renstra. Indikator Kinerja Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 untuk realisasi tahun 2020 sebesar 96,00% dengan target akhir Renstra sebesar 97,44% dan capaian tahun 2020 terhadap target akhir sebesar 98,52%.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan capaian terhadap target akhir renstra adalah sebagai berikut :

   a. Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B

   Indikator Kinerja Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B untuk realisasi tahun 2020 sebesar 86,50% dengan target akhir Renstra sebesar 55,63% dan capaian tahun 2020 terhadap target akhir sebesar 103,68%. Target akhir renstra tahun 2024 tercapai melebihi 100%, karena target telah tercapai dan penentuan target yang rendah.

   b. Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B

   Indikator Kinerja Persentase Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B untuk realisasi tahun 2020 sebesar 81,19% dengan target akhir Renstra sebesar 83,43% dan capaian tahun 2020 terhadap target akhir sebesar 145,95%. Target akhir renstra tahun 2024 tercapai melebihi 100%, karena target telah tercapai dan penentuan target yang rendah.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

3.1.4.1 INDIKATOR 1 dan 2 : APK dan APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C

A. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk pemenuhan Akses Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan

B. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan SLB
2. Masih Banyaknya Sarana Prasarana Pendidikan dalam kondisi rusak pada Pendidikan Menengah dan SLB

3. Tingkat ekonomi masyarakat yang belum merata menyebabkan belum semua keluarga mampu mendukung peningkatan APK pendidikan menengah. Hal ini khususnya sangat berkaitan dengan biaya personal yang harus disediakan oleh orang tua terhadap pendidikan anaknya, dan pada sisi lain pemerintah belum mampu mencover keseluruhan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan menengah.
4. Masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh nilai ke-ekonomian anak yang diharapkan telah mampu mendukung ekonomi keluarga.
5. Masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau, sehingga lulusan SMP sederajat harus mengalokasikan biaya khusus untuk biaya personal guna memperoleh layanan pendidikan menengah.

C. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Membangun Unit Sekolah Baru (USB) dan menambah Ruang Kelas Baru (RKB)
2. Merehabilitasi Ruang Kelas yang rusak
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka) berupa penambahan jumlah Tempat Kegiatan Belajar (TKB)
4. Pemenuhan akses Pendidikan agar menjadi prioritas dalam pelaksanaan anggaran
5. Meningkatkan perolehan penerimaan DAK Fisik dari Pemerintah Pusat

3.1.4.2 INDIKATOR 3 : Angka Putus Sekolah

A. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Peningkatan partisipasi sekolah dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dan pemberian bantuan bagi siswa miskin (BSM) dan komunitas adat terpencil (KAT)

B. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai

   Fasilitas pembelajaran di sekolah yang kurang memadai seperti fasilitas yang tersedia (alat, bahan dan media), buku pelajaran dan sebagainya merupakan faktor ketiga penyebab anak putus sekolah. Kebutuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat dipenuhi dapat menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan putus sekolah.

2. Kurang perhatian orang tua

   Kurangnya perhatian orang tua merupakan faktor kedua penyebab anak putus sekolah. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua anak, sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

3. Minat anak

   Rendahnya Minat Anak dapat di sebabkan Oleh Perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang Jauh, Fasilitas belajar yang kurang dan Pengaruh Lingkungan Sekitarnya. Tingkat Pendidikan Masyarakat Rendah yang diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan, ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu peranan lingkungan sangat berpengaruh terhadap minat anak bersekolah.

4. Budaya

   Budaya adalah hal-hal yang terkait dengan kebiasaan masyarakat sekitarnya. Rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya arti pendidikan. Perilaku masyarakat pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan. Mereka beranggapan tanpa sekolahpun anak-anak mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah, oleh karena di desa jumlah anak yang tidak bersekolah lebih banyak dan mereka dapat hidup layak, maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam menentukan masa depan anaknya. Pandangan banyak anak banyak rejeki membuat masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih usia sekolah untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah.

5. Lokasi Sekolah

   Lokasi atau letak sekolah merupakan faktor keenam yang mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan akses yang sulit merupakan hal hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi yang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh, akses yang sangat sulit dan keselamatan pun dianggap perlu dipertimbangkan.

6. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Memberikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dan optimalisasi dalam penggunaannya dengan kebijakan tidak ada pungutan oleh sekolah kepada siswa
2. Pemberian bantuan bagi siswa miskin (BSM) dan komunitas adat terpencil (KAT) untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa untuk bersekolah
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka) berupa penambahan

jumlah Tempat Kegiatan Belajar (TKB), sehingga anak-anak yang menjadi tulang punggung keluarga dan jarak sekolah yang jauh karena factor geofrafis tetap bisa belajar karena menggunakan pelayanan khusus.

3.1.4.3 INDIKATOR 4 : Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1

A. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Peningkatan mutu/ kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

B. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Masih adanya Kualifikasi Guru dibawah D-IV / S-1
2. Rendahnya Kualitas / Kompetensi Pendidik

C. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Meningkatkan kualifikasi pendidik melalui peningkatan pendidikan minimal D4/S1 dan beasiswa pendidikan melalui S2
2. Meningkatkan kompetensi pendidik melalui studi lanjut, misalnya berupa pendidikan dan pelatihan, penataran, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), seminar, dan kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti Penilaian Kinerja Guru (PKG)

3.1.4.4 INDIKATOR 5 dan 6 : Persentase Sekolah SMA dan SMK yang berakreditasi minimal B

A. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Peningkatan sarana dan prasarana sekolah dan peningkatan mutu/ kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta Penguatan

kelembagaan atau satuan pendidikan oleh Pengawas Pendidikan.

B. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Banyak sekolah/madrasah di daerah terpencil yang belum siap untuk diakreditasi.
2. Partisipasi pengelola program/lembaga pendidikan masih rendah karena belum melihat kepentingan (*urgency*) akreditasi sekolah dan belum jelas *civil effect*-nya.
3. Sinergi antara BAN Sekolah Madrasah, BAP sebagai lembaga akreditasi/penjaminan mutu dengan Dinas Pendidikan belum optimal.
4. Keterlambatan penyelesaian administrasi akreditasi dari satuan pendidikan.
5. Masa berlakunya Akreditasi yang sudah habis, tetapi belum diakreditasi kembali oleh BAN-SM
6. Kompetensi staf pada tingkat satuan pendidikan dalam membuat evaluasi diri sekolah (EDS) masih kurang
7. Kemampuan sekolah dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan masih kurang

C. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Mengusahakan keberlangsungan dukungan dana dari APBD Provinsi dan pihak terkait lainnya untuk membantu sekolah memenuhi 8 standar nasional pendidikan.
2. Menyusun jadwal dan rencana kegiatan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait Program/kegiatan akreditasi
3. Meningkatkan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh unit terkait di propinsi dan kabupaten/kota mengenai pentingnya penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

4. Meningkatkan koordinasi untuk bersinergi antara BAN S/M dengan Dinas Pendidikan provinsi untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan melalui pemenuhan 8 SNP, terutama dalam meningkatkan:
   a. Kemampuan sekolah untuk beradaptasi dengan perubahan
   b. Kemampuan sekolah dalam pengorganisasian program sekolah
   c. Kemampuan Tim Pengembang Sekolah
   d. Kemampuan Sekolah dalam Pengembangan nuansa akademik
   e. Kemampuan Sekolah dalam Pencapaian Prestasi Akademik
   f. Kemampuan Sekolah dalam Pencapaian Prestasi Non Akademik
   g. Kemampuan Sekolah dalam Mengembangkan Nilai- Nilai Karakter
   h. Kemampuan Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Sekolah.

3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

Tabel 3.22
Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran		
							Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3		4	5	6=5/4x100%	7	8	9=8/7*100%
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	85,26	86,65	101,63	**272.325.062.226**	**253.414.325.305**	**93,06**
		2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	62,09	66,86	107,68	**272.325.062.226**	**253.414.325.305**	**93,06**
		3	Angka Putus Sekolah	1,01	0,76	132,89	**787.578.895.897**	**742.538.457.622**	**94,28**

2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,44	96	100,59	**96.296.781.568**	**72.342.100.490**	**75,12**
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	82,63	86,5	104,68	**272.325.062.226**	**253.414.325.305**	**93,06**
		2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	54,83	81,19	148,08	**272.325.062.226**	**253.414.325.305**	**93,06**

Tabel 3.23
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3		4	5	6=4-5
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	101,63	93,06	8,57
		2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	107,68	93,06	14,63
		3	Angka Putus Sekolah	132,89	94,28	38,61
2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	100,59	75,12	25,47
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	104,68	93,06	11,62
		2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	148,08	93,06	55,02

Dari 6 (enam) indikator kinerja utama yang telah ditentukan, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang mendukung Program Pendidikan Menengah dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang sama yaitu APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C, APM

SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C, Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B dan Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B.

Indikator kinerja angka putus sekolah yang mendukung Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Indikator Kinerja Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 yang mendukung Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Dari 6 (enam) indikator kinerja utama, semua indikator kinerja dapat mencapai ≥ 100%. Bila dibandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran, maka untuk tingkat efisiensi tertinggi diperoleh dari indikator Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B yang tingkat efisiensi mencapai 55,02%.

3.1.1 Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.24
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program /Kegiatan	Anggaran		
								Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3		4	5	6=5/4x100 %	7	8	9	10=9/8x100%
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA / SMK/ SMLB/ Paket C	85,26	86,65	101,63	**Program Penyelenggaraan Pendidikan Menenengah**	**253.339.183.178**	**238.883.288.111**	**94,29**
							Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	**18.985.879.048**	**14.531.037.194**	**76,54**
		2	APM SMA/MA /SMK/ SMLB/Paket C	62,09	66,86	107,68	**Program Penyelenggaraan Pendidikan Menenengah**	**253.339.183.178**	**238.883.288.111**	**94,29**
							Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	**18.985.879.048**	**14.531.037.194**	**76,54**
		1	Angka Putus Sekolah	1,01	0,76	132,89	**Program Bantuan Operasional Sekolah**	**787.578.895.897**	**742.538.457.622**	**94,28**
2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,44	96	100,59	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan**	**96.296.781.568**	**72.342.100.490**	**75,12**

3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	82,63	86,5	104,68	**Program Penyelenggaraan Pendidikan Menenengah**	**253.339.183.178**	**238.883.288.111**	**94,29**
							Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	**18.985.879.048**	**14.531.037.194**	**76,54**
		2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	54,83	81,19	148,08	**Program Penyelenggaraan Pendidikan Menenengah**	**253.339.183.178**	**238.883.288.111**	**94,29**
							Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	**18.985.879.048**	**14.531.037.194**	**76,54**

Dari tabel 3.24 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase penyerapan anggaran Program Pendidikan Menengah sebesar 94,29%, dan persentase penyerapan anggaran Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sebesar 76,54%. Hal ini disebabkan karena 48 (empat puluh delapan) kegiatan mengalami kebijakan refocusing/rasionalisasi anggaran akibat dampak covid 19, namun indikator kinerja Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2020. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut untuk masa yang akan datang adalah mengusulkan kembali kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Persentase penyerapan anggaran Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 94,28%. Indikator kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2020. Masih ada 0,76% siswa SMA/SMK yang putus sekolah. Hal ini karena dipengaruhi beberapa faktor terutama pengaruh kondisi ekonomi masyarakat akibat dampak covid 19. Dinas Pendidikan Provinsi Riau berupaya memfasilitasi siswa putus sekolah melalui penyelenggaraan Sekolah Terbuka Pendidikan Jarak Jauh (SMATER).
3. Persentase penyerapan anggaran Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar 75,12%. Hal ini disebabkan ada 9 (Sembilan) kegiatan mengalami refocusing/rasionalisasi anggaran akibat dampak covid 19 dan kegiatan yang tidak maksimal

pelaksanaannya akibat dampak pandemi covid 19 yang pelaksanaannya secara daring. Namun indikator kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2020. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut untuk masa yang akan datang adalah mengusulkan kembali kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Derah (APBD). Berikut Realisasi Anggaran dan penjelasannya :

Anggaran belanja Dinas Pendidikan Provinsi Riau terbagi 2 (dua) bagian terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi, sehingga sampai dengan bulan Desember 2020 diperoleh capaian realisasi fisik dan daya serap keuangan. Analisis efisiensi dan efektifitas merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2020 yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Riau. Sedangkan untuk rincian realisasi masing-masing pelaksanaan program Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2020 dengan total realisasi jumlah belanja tidak langsung sebesar **Rp. 982.011.856.456,-** dan realisasi jumlah anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 1.079.933.516.634**,- dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.25
Realisasi Keuangan dan Fisik
Dinas Pendidikan Provinsi Riau

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
1	**Belanja Tidak Langsung**	**1.047.187.775.345**	**982.011.856.456**	**93,78**	**100**
2	**Belanja Langsung**	**1.171.019.833.244**	**1.079.933.516.634**	**92,22**	**94,61**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.293.593.553	10.537.382.957	79,27	90
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.525.500.000	1.101.250.260	72,19	100

	Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah	253.339.183.178	238.883.288.111	94,29	95,75
	Program Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus	18.985.879.048	14.531.037.194	76,54	88,48
	Program Bantuan Operasional Sekolah	787.578.895.897	742.538.457.622	94,28	100
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	96.296.781.568	72.342.100.490	75,12	93,41
TOTAL		**2.218.207.608.589**	**2.061.945.373.090**	**92,96**	**97,3**

Adapun penjelasan mengenai Realisasi anggaran, sebagai berikut :

1. Terdapat efisiensi dana;
2. Terdapat beberapa kegiatan yang belanjanya tidak dilaksanakan akibat dampak Pandemi Covid-19;
3. Kegiatan Mengalami kebijakan Refocusing/Rasionalisasi anggaran akibat dampak Covid-19.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk mengatasi kendala penyerapan anggaran ini antara lain :

1. Menyusun aturan pola pelaksanaan kegiatan dengan mewajibkan kepada setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan lebih awal, kecuali kegiatan-kegiatan yang dengan jadwal/kalender event nasional.
2. Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.
3. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketetapan waktu pelaksanaan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2020. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan *(stakeholders)* di dunia pendidikan. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2020 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari tujuh program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020. Ringkasan pengukuran kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau sesuai Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2		3	4	5	
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	85,26	86,65	101,63
		2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	62,09	66,86	107,68
		3	Angka Putus Sekolah	1,01	0,76	132,89
2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,44	96	100,59

3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	82,63	86,5	104,68
		2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	54,83	81,19	148,08

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2020 yang diukur berdasarkan 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan dan 6 (enam) indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dapat tercapai sebesar **≥ 100%**, sehingga capaian kinerja dikategorikan **"sangat tinggi"**.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan tahun 2020 untuk belanja tidak langsung dan tidak langsung adalah sebesar 92,96%. Belanja tidak langsung terealisasi sebesar 93,78%, masuk dalam katagori sangat tinggi dan belanja langsung terealisasi sebesar 92,22% dengan kategori sangat tinggi. Keberhasilan atau kegagalan yang ada pada tahun 2020 atau tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2019-2024, merupakan dasar berpijak bagi Dinas Pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang pendidikan untuk tahun berikutnya sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan dan antara lain adalah Masih adanya kesenjangan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dikarenakan keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesulitan menjangkau lokasi pendidikan, Meningkatnya kesenjangan ekonomi masyarakat karena dampak pandemi COVID-19 sehingga menurunkan kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan Adanya pergeseran anggaran terhadap belanja modal akibat dampak pandemi Covid 19 sehingga kegiatan pemenuhan akses pada satuan pendidikan tidak dapat terlaksana, terutama pemenuhan Ruang Kelas Baru yang berdampak pada daya tampung peserta didik. Solusi yang akan dilakukan di tahun depan untuk

mengatasi kendala/permasalahan yaitu Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka), Pemenuhan akses Pendidikan agar menjadi prioritas dalam pelaksanaan anggaran, Meningkatkan perolehan penerimaan DAK fisik dari Pemerintah Pusat.

4.2 LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Dinas Pendidikan pada masa mendatang akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang. Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk pemenuhan Akses Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan, Peningkatan partisipasi sekolah dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dan pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin yang tidak mampu, Peningkatan mutu/ kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan ketercapaian tersebut diharapkan Misi Gubernur Riau yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya dan Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun dapat terealisasi.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja SKPD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari system monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.